

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN PERIODE 2012-2016**

SKRIPSI

Oleh

A N T O

105710203014



**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2012-2016**

SKRIPSI

**A N T O
105710203014**

*Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat Penelitian pada Program Studi Ilmu
Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PEMSEBAHAN

Karya ilmiah kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Taju dan Ibunda Buati khusus sebagai hadiah kecil teruntuk mereka yang sangat berharga dalam hidupku, yang senantiasa berkorban dan memberikan segalanya dalam hidupku. Kalian adalah wujud terindah dan teristimewa yang ada dalam hidupku yang senantiasa ku sayangi. Izinkan ku persembahkan skripsi ini untuk kalian yang terkasih yang telah memberikan segalanya kepadaku selama ini.

MOTTO HIDUP

Jika kamu benar menginginkan sesuatu
kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius
kau hanya akan menemukan alasan



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi
Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-
2016"
Nama Mahasiswa : Anto
No Stambuk/NIM : 105710203014
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan
panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018.

Makassar, 21 Agustus 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN: 0010026403

Pembimbing II,

H. Basri Basir MR, SE., M.Ak., CBC
NIDN: 0926098904

Diketahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Jemail Rasulong, SE., MM
NBM : 903 078

Ketua,

Jurusan IESP

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM. 710 561



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Anto, Nim : 105710203014, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/60201/091004/2018 M. Tanggal 09 Dzulhijjah 1439 H/ 21 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Dzulhijjah 1439 H

21 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Hj. Naidah, SE., M.Si (.....)
2. Dr. Akhmad, SE., M.Si (.....)
3. Asriati, SE., M.Si (.....)
4. Muh. Nur R, SE., MM (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anto

Stambuk : 105710203014

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)

Dengan Judul : "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi
Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-
2016".

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 21 Agustus 2018

Yang membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
KEM 1AFF282745671
6000
RUPIAH
Anto

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua,
Jurusan IESP


HJ. Nafdah SE., M.Si
NBM: 710 561

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakal penulis skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Taju dan Ibunda Buati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu

pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM. Rektor Universitas muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj. Naidah, SE., M.,Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Basri Basir MR, SE., M.Ak., CBC selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar.
8. Akbar Fatur Rahman, Melfa Chantika dan Nurlena Arifin yang membantu dan meberikan semangat setiap harinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis program studi ilmu ekonomi studi pembangunan Angkatan 2014 khususnya kelas IESP 2 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bias saya tulis satu per satu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Alamamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualikum Wr, Wb

Makassar, 15 Agustus
2018

ANTO
105710203014

ABSTRAK

ANTO, 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016, Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Hj. Naidah, dan Basri Basir MR.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2012-2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah data publikasi Badan Pusat Statistik berupa data gini ratio, jumlah penduduk, upah minimum regional, dan PDRB sektor industri selama tahun 2012-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa nilai koefisien regresi populasi penduduk adalah 4,024 dengan tingkat signifikansi 0,035, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai koefisien regresi UMP adalah 2,524 dengan tingkat signifikansi 0,025, sehingga dapat disimpulkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai koefisien regresi kontribusi sektor industri adalah -6,553 dengan tingkat signifikansi 0,025, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi sektor industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016.

Kata Kunci : *Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Populasi Penduduk, UMP, dan Kontribusi Sektor Industri.*

ABSTRACT

ANTO, 2018. Factors Affecting Inequality of Income Distribution in South Sulawesi Province 2012-2016, Thesis of Economics and Development Studies Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Hj. Naidah, and Basri Basir MR.

This study aims to determine the factors that influence the inequality of income distribution in South Sulawesi Province in the period 2012-2016. The type of research used in this study is research with a quantitative descriptive approach. The processed data is the Central Statistics Agency's publication data in the form of gini ratio data, population number, province minimum wage, and industrial sector GRDP during 2012-2016. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis technique. Based on the results of the study, it was found that the regression coefficient of the population is 4.024 with a significance level of 0.035, so it can be concluded that the population has a positive and significant effect on the inequality of income distribution in South Sulawesi Province. The UMP regression coefficient value is 2.524 with a significance level of 0.025, so it can be concluded that province minimum wages have a positive and significant effect on the inequality of income distribution in South Sulawesi Province. Coefficient value of industrial sector contribution regression is -6,553 with a significance level of 0,025, so it can be concluded that the contribution of the industrial sector has a negative and significant effect on the inequality of income distribution in South Sulawesi Province 2012-2016.

Keywords : *Inequality of Income Distribution, Population, UMP, and Industrial Sector Contribution.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Pengertian Distribusi Pendapatan	6
2. Dampak Distribusi Pendapatan	8
3. Pengukuran Distribusi Pendapatan	8
4. Pengertian Penduduk	11
5. Faktor Pertambahan Penduduk	11
6. Dampak Kepadatan Penduduk	13
7. Pengertian Upah Minimum Provinsi	14
8. Tujuan Penetapan Upah Minimum Provinsi	15
9. Pengertian Industri	16
10. Jenis Industri Berdasarkan Karakteristik	17
11. Dampak Pembangunan Industri	18
12. Kebijakan Pemerintah di Bidang Industri	18

13. Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan	20
B. Tinjauan Empiris.....	21
C. Kerangka Konsep.....	24
D. Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran	26
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan	35
1. Kondisi Geografis	35
2. Potensi Sumber Daya.....	36
3. Peluang Investasi	40
B. Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	46
1. Populasi Penduduk.....	46
2. Upah Minimum Provinsi	49
3. Kontribusi Sektor Industri.....	50
4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	51
C. Hasil Uji Asumsi Klasik	52
1. Hasil Uji Normalitas	52
2. Hasil Uji Multikolinieritas	54
3. Hasil Uji Autokorelasi.....	55
4. Hasil Uji Heterokedastisitas	56

D. Hasil Pengujian Hipotesis	57
1. Uji Simultan (Uji-F).....	57
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58
3. Uji Partial (Uji-T)	58
E. Pembahasan	60
1. Pengaruh Populasi Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	60
2. Pengaruh UMP Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	62
3. Pengaruh Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan PDRB dan Distribusi Pendapatan di Sul-Sel Tahun 2007-2016	3
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016	48
Tabel 4.2 Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016	49
Tabel 4.3 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016	50
Tabel 4.4 Indeks Gini di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	55
Tabel 4.7 Klasifikasi Nilai DW Untuk Autokorelasi	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji-F)	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Partial (Uji-T)	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	
Kerangka Pikir Penelitian Gambar 4.1	24
Grafik Norma P-Plot Gambar 4.2	53
Grafik Scatterplot	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights (Glaeser, 2006).

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah kesenjangan ekonomi yang umum dihadapi oleh negara-negara berkembang, pada pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang menghadapi masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dimana dalam catatan Badan Pusat Statistik pada bulan September 2013 jumlah

penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,60 juta orang dan pada Maret 2014 penduduk miskin berkurang sebesar 0,32 juta orang yaitu 28,28 juta orang (Edi, 2016).

Adapun salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami ketimpangan distribusi pendapatan ialah Provinsi Sulawesi selatan. Meskipun perekonomian Sulawesi Selatan saat ini cukup memiliki prospek, namun disisi lain masih timpang atau besar, yang di lihat dari *Gini Ratio* Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi atau (PDRB) dan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2001 Indeks Gini 0,27 sampai 2010 Indeks Gini 0,4. Hal ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada pada ketimpangan yang cukup mengkhawatirkan dan mengakibatkan semakin banyaknya penduduk miskin, dan beberapa pengaruh lain yang merupakan masalah yang saling berkaitan di antara keduanya.

Jika dicermati berdasarkan data publikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2007-2016 memiliki kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2007 pertumbuhan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,11 persen meningkat menjadi 8,18 persen pada tahun 2016. Peningkatan tersebut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan. Meskipun mengalami perkembangan akan tetapi faktanya belum berdampak terhadap penurunan ketimpangan pendapatan, yang ditandai angka gini rasio yang cenderung meningkat

setiap tahunnya dari 0,27 pada tahun 2008 meningkat menjadi 0,40 pada tahun 2016.

Tabel 1.1
Perbandingan PDRB dan Distribusi Pendapatan di SulSel
Tahun 2007 - 2016

Tahun	PDRB Sulawesi Selatan	IndeksGini Sulawesi Selatan
2007	5,11	0,27
2008	3,10	0,28
2009	5,25	0,3
2010	5,20	0,32
2011	6,05	0,34
2012	6,72	0,35
2013	6,34	0,37
2014	7,78	0,36
2015	6,20	0,39
2016	8,18	0,4

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas maka penulis menyimpulkan bahwa distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan yang diukur lewat indeks gini relatif timpang padahal pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang diukur dari PDRB yang cukup tinggi, Hal ini secara tidak langsung

menggambarkan bahwa di Sulawesi Selatan terjadi ketimpangan pendapatan yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk miskinnya semakin banyak pula.

Berdasarkan nuraian tersebut di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah populasi penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan?
2. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan?
3. Apakah Kontribusi Sektor Industri berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMP) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dokumentasi pada perpustakaan Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar serta dapat dikembangkan lebih luas dalam penelitian selanjutnya.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Distribusi Pendapatan

Distribusi Pendapatan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Dari perhitungan ini akan dapat dilihat porsi pendapatan nasional yang dikuasai oleh berapa persen dari penduduk. Gunanya untuk melihat seberapa besar penguasaan pendapatan nasional tersebut sehingga dapat diketahui apakah ada pendapatan nasional oleh segelintir orang atau terjadi pemerataan diantara penduduk di negara tersebut.

Menurut Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif yaitu:

a. Pendapatan Personal

Pendapatan personal atau pendapatan pribadi merupakan distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah

tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi (apakah di wilayah desa atau kota) dan jenis pekerjaan.

b. Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dapat digambarkan dalam 2 hal yaitu :

- 1) Adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima. Penduduk penerima pendapatan :
 - a) 40 (empat puluh) persen penduduk menerima pendapatan paling rendah.
 - b) 40 (empat puluh) persen penduduk menerima pendapatan menengah.
 - c) 20 (dua puluh) persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi.
- 2) Distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya

adalah kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan rendah bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional.

2. Dampak Distribusi Pendapatan

Adapun dampak rendahnya tingkat distribusi pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah:

- a. Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang baik.
- b. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Untuk meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat (kesejahteraan masyarakat), sehingga dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan pemerintah melakukan upaya dalam bentuk :
 - 1) Menekan laju pertumbuhan penduduk
 - 2) Merangsang kemauan berwiraswasta
 - 3) Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga / industrialisa
 - 4) Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa

3. Pengukuran Distribusi Pendapatan

Sebuah indikator diperlukan untuk melihat bagaimana pendapatan nasional didistribusikan dalam suatu negara. Apabila terdapat ketimpangan atau ketidakseimbangan distribusi pendapatan hal ini akan dapat langsung

terlihat dan pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan tersebut Terdapat dua indikator yang banyak digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan nasional, yaitu Koefisien Gini dan Koefisien Bank Dunia (Zaenuddin, 2015)

a. Koefisien Gini

Indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam suatu negara adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva, yang disebut dengan Kurva Lorenz.

Sumbu horizontal pada Kurva Lorenz melambangkan presentase kumulatif penduduk. Sumbu vertikalnya melambangkan persentase pendapatan yang diterima oleh masing-masing presentase penduduk. Garis diagonal di tengah kurva adalah "garis pemerataan sempurna", karena semua titik pada garis tersebut adalah posisi di mana pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, yaitu presentase penduduk yang sama dengan presentase penerimaan pendapatan.

Koefisien Gini adalah rasio (perbandingan) antara luas bidang yang diarsir dengan luas segitiga. Daerah yang diarsir menggambarkan besarnya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Apabila Kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal, berarti ketimpangan distribusi pendapatan semakin besar. Apabila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah yang diarsir akan bernilai nol (daerah tersebut sama dengan garis diagonal),

sehingga nilai koefisien sama dengan nol. Apabila hanya satu pihak saja yang menerima pendapatan maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga nilai koefisien sama dengan satu.

Jadi, distribusi pendapatan dikatakan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol. Distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika Koefisien Gini mendekati satu. Adapun rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut (Zaenuddin, 2015).

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

b. Kriteria Bank Dunia

Dalam menilai distribusi pendapatan nasional, terdapat cara lain di samping perhitungan Koefisien Gini, yaitu dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia (World Bank). Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin

Tabel 2.1
Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran	Tinggi
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran	Sedang

Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran	Rendah
---	--------

4. Pengertian Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili diwilayah geografis Republik Indonesia selama enam atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Kuncoro, 2013:63).

Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel tertentu, misalnya; umur, jenis kelamin, agama, mata pencarian, bahasa, tempat tinggal, dan lain-lain. Salah satu pengelompokan yang paling sering digunakan adalah pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya (Sukirno, 2005:142).

5. Faktor Pertambahan Penduduk

Perubahan jumlah penduduk baik bertambah maupun menurunnya di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu dinyatakan dalam presentase disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Kelahiran (*natalitas*)

Kenaikan penduduk dapat melonjak drastis karena bertambahnya angka kelahiran. Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang menghambat kelahiran dan yang mendukung kelahiran.

1) Faktor penunjang kelahiran

Kawin pada usia muda, karena ada anggapan bila terlambat kawin keluarga akan malu. Anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk membantu orang tua. Anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki. Anak menjadi kebanggaan bagi orang tua.

2) Faktor-faktor penunjang kelahiran

Adanya program keluarga berencana yang mengupayakan pembatasan jumlah anak. Adanya ketentuan batas usia menikah, untuk wanita minimal berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun. Anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri yaitu tunjangan anak diberikan hanya sampai anak ke – 2. Penundaan kawin sampai selesai pendidikan akan memperoleh pekerjaan.

b. Kematian (*Mortalitas*)

Kematian (*Mortalitas*) merupakan salah satu komponen demografi yang mempengaruhi struktur demografi dan jumlah penduduk, dimana menjadikan hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

c. Migrasi

Migrasi merupakan aktivitas pindahnya seseorang, sedangkan oranya yang pindah tempat tinggal disebut migrant. Definisi migran menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) "*A migrant is a person who change his place of residence from one political or administrative area to another*". Pengertian ini dikaitkan dengan pindah tempat tinggal secara permanen sebab selain itu dikenal pula mover yaitu orang yang pindah dari suatu alamat ke alamat lain.

Menurut (Stiyawan, 2010) Beberapa bentuk perpindahan tempat (mobilitas) antara lain:

- 1) Perubahan tempat yang bersifat rutin misalnya orang yang pulang balik kerja (*recurrent movement*).
- 2) Perubahan tempat yang tidak bersifat sementara.
- 3) Perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak akan kembali ketempat semula (*non recurrent movement*).

6. Dampak Kepadatan Penduduk

Menurut (Maya, 2014) Kepadatan penduduk memiliki beberapa dampak negatif, yaitu:

- a. Sosial Ekonomi : Urbanisasi penduduk tidak merata, kemiskinan dan kriminalitas meningkat
- b. Bidang Pendidikan : Tingkat pendidikan menurun dan biaya pendidikan meningkat
- c. Bidang Kesehatan : Akibat kualitas lingkungan menurun, penyakit merajalela, sehingga kualitas kesehatan masyarakat menurun
- d. Lingkungan Hidup : Kerusakan hutan akibat ladang berpindah, kekurangan air, kekurangan oksigen, keterbatasan lahan, penebangan pohon secara liar, berkurangnya lahan pertanian karena digunakan untuk perumahan dan industri, banyak limbahindustri, rumah tangga, dan asap kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi air, tanah, dan udara.

7. Pengertian Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah mempunyai kedudukan yang strategis bagi tenaga kerja itu sendiri, perusahaan dan bagi pemerintah.

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi.

Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1999, "Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar minimal pengupahan oleh pengusaha kepada seluruh karyawannya berdasar pada ketetapan di suatu daerah tertentu". Berdasarkan peraturan menteri tersebut, UMR dibagi menjadi 2 yaitu UMR tingkat I yang berada di Provinsi, dan UMR tingkat II di Kota /Kabupaten. Namun Dengan adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 226 Tahun 2000 UMR tingkat I telah dirubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMR tingkat II dirubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

b) Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh. Usulan upah minimum sektoral (hasil kesepakatan) tersebut disampaikan kepada gubernur melalui Kepala Kantor wilayah Kementrian tenaga kerja untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral propinsi dan atau upah minimum sektoral kabupaten. Upah minimum sektoral dapat terdiri atas upah minimum sektoral propinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral/kota (UMSK). Upah minimum sektoral propinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral

Kabupaten/Kota (UMSK) adalah Upah minimum Sektoral di Daerah Kabuten/Kota.

8. Tujuan Penetapan Upah Minimum Provinsi

Upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Upah minimum mendorong terwujudnya keadilan bagi pekerja-pengusaha, dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal bagi semua yang bekerja dan yang memerlukan perlindungan. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur. Gubernur dalam menetapkan upah minimum dapat menggunakan pertimbangannya sendiri tentang upah yang layak, karena pekerja/buruh tidak boleh dibayar di bawah nilai kebutuhan hidup layak dan atau perlindungan sosialnya. Gubernur juga berperan penting dalam mengembangkan kebijakan upah minimum. Jadi, Gubernur dapat melakukan diskresi untuk memastikan bahwa keadilan sosial dapat dicapai melalui kebijakan upah minimum. Akan tetapi, diskresi tersebut harus benar-benar memastikan negara memberikan perlindungan yang sama bagi pekerja dan pengusaha.

9. Pengertian Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa (Ayana, 2012)

Selain itu menurut (Undang-Undang RI No.5 tahun 1984 tentang perindustrian) Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum sama dalam proses produksi.

Sektor industri merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi structural bangsa kearah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional (Siti; 2004)

10. Jenis-Jenis Industri Berdasarkan Karakteristik

Jenis-Jenis Industri Berdasarkan Karakteristik

a. Industri Berdasarkan Tempat Bahan Baku

1) Industri ekstraktif

Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

2) Industri nonekstraktif

Industri nonekstraktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

3) Industri fasilitatif

Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contoh : Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

b. Industri Berdasarkan Besar Kecil Modal

1) Industri Padat Modal

Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.

2) Industri Padat Karya

Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

11. Dampak Pembangunan Industri

a. Dampak positif

- 1) Menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran
- 2) Perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat
- 3) Perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah
- 4) Usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk
- 5) Mengurangi ketergantungan Negara pada luar negeri
- 6) Dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan.

b. Dampak negatif

- 1) Limbah industri akan menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara
- 2) Asap-asap pabrik menimbulkan polusi udara
- 3) Akibat dari pencemaran, banyak menimbulkan kematian bagi binatang.
- 4) binatang, manusia dapat terkena penyakit, hilangnya keindahan alam dan lain-lain

12. Kebijakan Pemerintah di Bidang Industri

Kebijakan Pemerintah mengembangkan perekonomian di Indonesia berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan. Pengembangan sektor industri pengolahan mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan (Gusasta, 2014).

Ada 5 kebijakan pemerintah dibidang industry menurut (Gusasta, 2014) yaitu:

- a. Pembangunan industri diarahkan pada industri-industri yang berbasis pertanian dan pertambangan, dan kelautan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional, nasional, global dan mampu menghasilkan nilai tambah tinggi.
- b. Pengembangan IKM dan Industri Mikro (Industri Rumah Tangga), perlu didorong dan dibina, menjadi usaha yang makin berkembang

dan maju, sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

- c. Menggalakkan iklim yang sehat dalam berusaha bagi pelaku ekonomi (koperasi, usaha negara, usaha swasta) untuk menumbuhkan kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi.
- d. Meningkatkan pertumbuhan usaha kecil informal menjadi pengusaha kecil formal yang tangguh dan mandiri melalui bantuan pembangunan infrastruktur, perijinan dan bantuan teknis.
- e. Meningkatkan dan mengoptimalkan perolehan devisa ekspor produk industri kehutanan, pertambangan, pertanian, dalam arti luas berikut industri turunannya.

13. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi merupakan masalah utama yang terjadi akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, dimana hal ini dialami di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia dan merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Ketika masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan ialah adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi

perekonomian berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Ketimpangan Distribusi Pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor Upah Minimum Provinsi (UMP) dimana upah minimum cukup tinggi untuk menjadi efektif, meningkatkan pengangguran, khususnya di antara pekerja dengan produktivitas yang sangat rendah karena kurangnya pengalaman sehingga merugikan pekerja kurang terampil dan mungkin tidak termasuk beberapa kelompok dari pasar tenaga kerja, selain itu kurang efektif dan lebih merusak bisnis dari pada metode lain untuk mengurangi kemiskinan. Dampak upah minimum terhadap distribusi pendapatan keluarga mungkin negatif kecuali pekerjaan lebih sedikit tetapi lebih baik dialokasikan untuk anggota.

Faktor ketimpangan distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh kontribusi sektor industri. Kebijakan investasi dalam sektor industri berdampak pada penyesuaian struktural terhadap ke tidak merataan pendapatan (income inequity), sehingga adanya dampak dari sistem industri dan dinamikanya terhadap kualitas ekonomi, sosial, fisik dan komponen terbangun dari lingkungan masyarakat, khususnya kondisi pasar tenaga kerja, pendapatan riil, kesejahteraan, dan sejenisnya. Untuk dapat mengatasi persoalan yang akan ditimbulkan oleh pembangunan industri, pemerintah daerah perlu mengetahui gambaran menyeluruh mengenai industri itu sendiri serta dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan pada distribusi pendapatan.

B. Tinjauan Empiris

1. Jurnal Vredrich Bantika dengan judul FAKTO-FAKTOR Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Utara Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah jumlah penduduk, luas lahan pertanian

dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil regresi linier berganda memberikan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 92,3 %. dengan peubah bebasnya adalah jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dari tiga peubah bebas, ternyata hanya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh nyata terhadap indeks gini. Dilihat dari arah pengaruhnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi menurunkan indeks gini sedangkan penambahan jumlah penduduk meningkatkan indeks gini di Sulawesi Utara.

2. Anis Tunas Syilviarani 2017 dengan judul Analisis Factor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi, IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, UMR terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Jenis penelitian ini merupakan *datatime series*. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 Provinsi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menggunakan Indeks Gini hasil menunjukkan Ketimpangan pendapatan tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta dan ketimpangan pendapatan terendah terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel. Model yang paling tepat dipilih dalam penelitian ini adalah *Pooled Ordinary Least square (PLS)*. Berdasarkan dari hasil Uji Eksistensi Model, secara serempak variabel Inflasi, IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, UMR berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2010-2015. Hasil uji koefisien

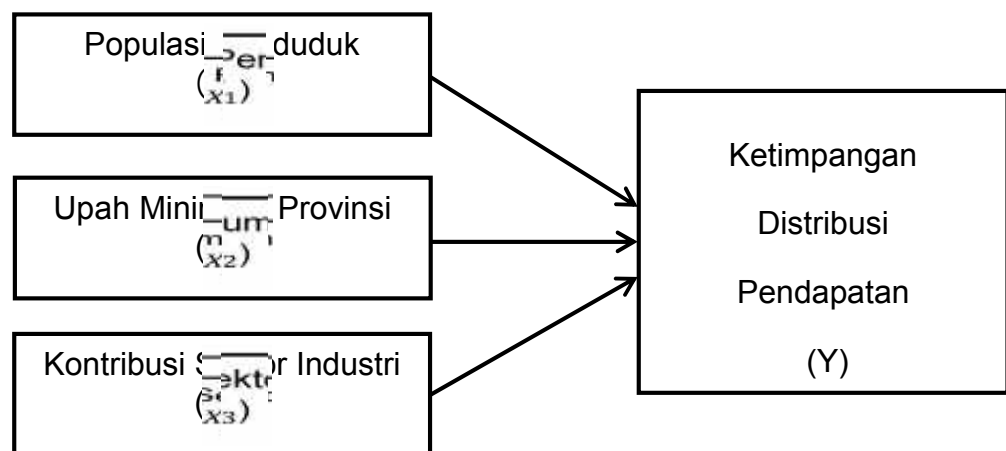
determinan menunjukkan bahwa besarnya nilai R-square 0.566813 atau sebesar 56.68%. Artinya variasi Indeks Gini dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada dalam model statistik seperti (Inflasi, IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, UMR). Sedangkan sisanya sebesar 43.32% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain yang tidak disertakan dalam model

3. Skripsi Maya Kartika (2014) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Periode 2003-2012 tinjauan umum tentang distribusi pendapatan yang menjelaskan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama jumlah populasi penduduk yang berusia produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum kerja di Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan periode 2003-2012.
4. Skripsi Ma'mun Musfidar (2012) dengan judul Faktor-Faktor yang mempengaruhi ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010 dengan hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa populasi jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yang berusia produktif baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja lebih banyak yang berada di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Selain itu penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa provinsi Sulawesi Selatan tingkat UMR yang ditetapkan oleh pemerintah cukup

tinggi karena dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan.

5. Skripsi Syahrina Syam (2015) Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar hasil penelitian ini bahwa secara simultan upah dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa upah dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dengan signifikan terhadap pengangguran di kota Makassar.

C. Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan hipotesis ekonomi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah :

1. Populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.

2. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.
3. Kontribusi sektor industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Kuantitatif*, yaitu mendeskripsi komparatif secara sistematis, Factual dan akurat terhadap suatu perlakuan pada wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui pendekatan kuantitatif khususnya pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan tahun 2012-2016 yang akan diuji secara empiris.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kota Makassar sebagai iobjek penelitian dengan menetapkan data Distribusi Pendapatan daerah yang Diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Haji Bau No. 6. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juli 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data yang menyangkut tentang Populasi Penduduk, Upah Minimum Provinsi, Kontribusi Sektor Industri, dan Distribusi Pendapatan Daerah yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi yang terkait.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah Data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yaitu segala bentuk data yang diperoleh melalui kepustakaan (library research) baik berupa majalah, jurnal, artikel maupun dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data sekunder yang dikumpulkan yaitu berupa literatur ilmiah, buku, internet, dan diktat kuliah yang berhubungan dengan topik penulisan ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan populasi penduduk, Upah Minimum, Kontribusi Sektor Industri dan Distribusi Pendapatan. Sumber data berasal dari BPS dan Situs internet. Data yang diambil yaitu, Populasi penduduk, Upah Minimum, Kontribusi Sektor Industri dan Distribusi Pendapatan.

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel independen (X). Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independent

Variabel independent adalah variabel bebas yaitu, variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependent (variabel tak bebas).

- a. Populasi penduduk merupakan variabel (X_1) yaitu, populasi penduduk produktif yang berusia 15-55 tahun yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data tahunan yang dikeluarkan oleh BPS dari tahun 2012 s/d 2016.
- b. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan variabel (X_2) yaitu, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan untuk tenaga kerja dari tahun 2012 s/d 2016 yang diukur dalam rupiah . Data yang digunakan adalah data tahunan yang dikeluarkan oleh BPS dari tahun 2012 s/d 2016.
- c. Kontribusi Sektor Industri merupakan variabel (X_3) yaitu, nilai hasil produksi sektor industri pengolahan di Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data tahunan yang dikeluarkan oleh BPS dari tahun 2012 s/d 2016.

2. Variabel Dependent

Variabel Dependent adalah variabel tidak bebas yaitu, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel Dependent dalam penelitian ini adalah Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Ketimpangan Distribusi Pendapatan merupakan Variabel (Y), yaitu ketidakmerataan pendapatan di sejumlah daerah Sulawesi Selatan. Data yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dilakukan dengan rumus koefisien Gini yang dikembangkan oleh Gini tahun 1912. Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan yang dikeluarkan oleh BPS dari tahun 2012 s/d 2016 diukur dengan menggunakan Indeks Gini di Sulawesi Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode komparatif dan kuantitatif, yaitu membandingkan suatu permasalahan dan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal, maksudnya adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. Selain itu Uji Normalitas bisa dilakukan dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Data yang berdistribusi normal adalah Sig. Kolmogorov-Smirnov hitung > Sig. Penelitian (0,05). Dan Jika signifikan siKolmogorov-Smirnov hitung yang diperoleh < α , maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Selain itu deteksi terhadap multikolinearitas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji t-parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas apabila mempunyai Nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka Tolerance mendekati 1. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah jika nilai tolerance kurang dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel yang tinggi diantara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas perlu dikemukakan hipotesis dalam bentuk sebagai berikut :

Ho : Tidak terjadi adanya multikolinearitas diantara data pengamatan

Ha : Terjadi adanya multikolinearitas diantara data pengamatan

c. Uji Autokorelasi

Uji yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara data dalam variabel pengamatan. Apabila terjadi korelasi akan

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data bersifat time series. Uji Durbin Watson adalah cara untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi linear berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah “Tidak Ada Autokorelasi Positif dan Negatif” atau mendekati angka 2. Pengujian autokorelasi penelitian ini menggunakan uji Durbin-watson (DW test). Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai DW terletak diantara batas bawah dan batas atas ($dL < d < dU$) atau DW terletak diantara $4-dU$ dan $4-dL$ ($4-dU < DW < 4-dL$), hasilnya tidak dapat disimpulkan karena berada pada daerah yang tidak meyakinkan (*inconclusive*).
2. Apabila nilai DW melampaui $4-dL$ ($DW > 4-dL$) berarti autokorelasi negatif.
3. Apabila nilai DW terletak antara antara batas atas dan $4-dU$ ($du < DW < 4-dU$), berarti tidak terdapat autokorelasi.

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi perlu dikemukakan hipotesis dalam bentuk sebagai berikut :

H_0 : Tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

H_a : Terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menentukan apakah model yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah Heteroskedastisitas maka dilakukan uji Glejser.

Bila variabel bebas secara statistik signifikan mempengaruhi residual maka model dalam penelitian ini terdapat gejala Heteroskedastisitas dan sebaliknya jika bila variabel bebas secara statistik tidak signifikan mempengaruhi residual maka model dalam penelitian ini tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi

Alat analisis yang akan digunakan dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan alat analisis model ekonometrik regresi linear berganda yang nantinya akan diolah dengan bantuan alat analisis statistik SPSS 23. Adapun persamaan awal dari model statistik yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Model tersebut kemudian diformulasikan untuk menaksir perkiraan dengan persamaan *Regresi Linear Berganda*, dalam "*Ekonometric Models and Economic Forecast*" sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan :

Y = ketimpangan distribusi pendapatan

α = Konstanta

β_1 = koefisien populasi penduduk

β_2 = Koefisien Upah Minimum Provinsi

β_3 = Koefisien Kontribusi Sektor Industri

X_1 = Populasi Penduduk

X_2 = Upah Minimum Provinsi

X_3 = Kontribusi Sektor industri

3. Uji Hipotesis

a. Uji-t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_k = 0$$

$$H_1 : \beta_k \neq 0$$

Kriteria uji yang digunakan adalah jika *t-test* lebih besar dari nilai *t-table* ($t\text{-test} > t\text{-table}$ misalnya pada tingkat signifikansi *level of significance*) 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak (*rejected*), artinya variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai *t-test* lebih kecil dari nilai *t-table* ($t\text{-test} < t\text{-table}$) misalnya pada tingkat signifikansi (*level of significance*) 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak (*rejected*), artinya variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, jika probabilitas (*p-value*) lebih kecil

dari taraf nyata misalnya pada ($\alpha=5\%$) maka dapat digunakan juga untuk menolak H_0 . demikian pula sebaliknya.

b. Uji f

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen di dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan. Perumusan hipotesis pada Uji-F adalah :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_k = 0$$

H_1 : Minimal ada satu nilai β yang tidak sama dengan nol

Kriteria ujinya adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, misalnya pada tingkat signifikansi (*level of significancy*) 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak (*rejected*), artinya variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ misalnya pada tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak ditolak (*not rejected*), artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

4. R-Square (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variabel variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen.

Sifat dari koefisien Determinasi adalah :

- a. R² merupakan besaran yang non negatif
- b. Batasannya adalah ($0 \leq R^2 \leq 1$)

Apabila R² bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai maka semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. Hubungan antara dua variabel penelitian memberikan kriteria sebagai berikut (Sarwono:2006):

Tabel 2.1
Kriteria Hubungan Antar Variabel (Koefisien Determinasi)

Nilai R Square	Keterangan
0	Tidak ada Korelasi
>0-0,25	Korelasi Sangat Lemah
>0,25-0,50	Korelasi Cukup
>0,50-0,75	Korelasi Kuat
>0,75-0,99	Korelasi Sangat Kuat
1	Korelasi Sempurna

Sumber: Sarwono (2006)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kondisi Geografis

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Jazira selatan pulau Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujung Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan terletak 0012' – 80 Lintang Selatan dan 116048' – 122036' Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km² (42% dari luas seluruh Pulau Sulawesi dan 4,1% dari luas seluruh Indonesia). Provinsi ini memiliki posisi yang strategis di kawasan timur Indonesia yang memungkinkan Provinsi ini sebagai pusat pelayanan, baik bagi kawasan timur Indonesia maupun skala Internasional. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores.

Hampir 75 persen wilayah Sulawesi Selatan merupakan daerah daratan tinggi yang memajang ditengah daratan dari utara ke selatan melalui Gunung Rante Mario dan Gunung Ganda Dewata di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, di wilayah bagian utara hingga

Gunung Lompobattang di Kabupaten Bantaeng daratan rendah/ pantai membentang sepanjang pesisir pantai barat, tengah dan timur dengan total panjang pantai yang dimiliki kurang lebih 2500 km.

Secara administrasi, pada tahun 2009 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten 3 kota, 304 kecamatan dan 2182 desa dan 764 kelurahan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kawasan industri dengan status BUMN, dengan luas 233,9642 ha. Luas area yang terpakai baru sekitar 82,001871 ha

2. Potensi Sumber Daya

a. Potensi Sumber Daya Alam

Luas kawasan hutan yang merupakan sumber daya hutan menempati 46,76% dari total luas daratan Sulawesi Selatan yang terdiri dari fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi-fungsi khusus. Potensi sumber daya hutan yang ditetapkan sebagai fungsi lindung hanya sebesar 27,13% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan tidak proporsional dalam fungsi lindungnya dikaitkan dengan bentang alam Sulawesi Selatan yang dipengaruhi oleh gunung yang membentang dari selatan-utara (Gunung Lompobattang, Bawakaraeng, Latimojong, Balase, Kambuno, Rante Mario, dan Rante Kumbala). Telah terjadi penipisan sumber daya hutan baik dalam fungsi lindungnya maupun fungsi produksinya yang terindikasi pada kondisi kawasan hutan yang hanya 60,27%

vegetasi berhutan dan luasnya lahan kritis dalam kawasan hutan (17,9%).

Pemanfaatan sumber daya hutan dalam fungsi produksi (ekonomi) belum memberikan sumbangan yang berarti dalam perekonomian Sulawesi Selatan baik dalam sumbangan langsungnya (0,21% dari total PDRB 2004) maupun dorongannya /dukungannya terhadap industri pengolahan bahan hasil hutan. Telah terjadi penurunan daya dukung sumber daya hutan terhadap lingkungan khususnya terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan terjadinya erosi/sedimentasi, banjir, longsor pada beberapa lokasi sungai dan bendung/waduk yang menimbulkan *Impact* lebih luas.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dinilai sangat kritis adalah DAS Jeneberang karena luas kawasan hutan yang tidak proporsional terhadap luas wilayah dengan kondisi vegetasi yang buruk, presentase lahan kritis dalam kawasan hutan yang besar dan pengaruh topografi gunung Lompobattang dan Bawakaraeng yang mengakibatkan DAS Jeneberang rentang terhadap erosi, longsor, banjir dan pendangkalan pada bendung.

b. Potensi Sumber Daya Mineral

Sumber Daya Alam Mineral/Tambang dalam perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar utamanya dalam mendorong dan mendukung

berkembangnya sektor industri. Potensi Sumber Daya Mineral keterdapatannya cukup besar berupa gas bumi dan 28 jenis bahan galian potensial yang sebarannya pada 19 kabupaten. Keterdapatan dan ketersebaran galian potensial menyebabkan overlap dengan fungsi-fungsi sumber daya alam lainnya sehingga pemanfaatan potensi tambang/galian rentang terhadap masalah-masalah lingkungan.

Pemanfaatan potensi sumber daya mineral belum optimal karena dipengaruhi oleh pangsa pasar, teknologi dan pertimbangan aspek lingkungan. Namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Selatan, dan dukungannya terhadap industri yang memanfaatkan bahan galian bukan logam.

Pemanfaatan potensi tambang/galian meskipun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Selatan, tetapi sumbangannya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat kecil (hanya 0,4% dari total tenaga kerja), yang berarti kurang memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat. Potensi tambang/galian yang telah di eksploitasi maupun yang belum dieksploitasi berpotensi untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha/industri/rakyat/kecil/RT dengan teknologi sederhana dan mudah diserap masyarakat. Eksploitasi

pertambangan saat ini yang dilakukan dalam kawasan hutan arealnya cukup luas yang memerlukan upaya reklamasi hutan.

c. Potensi Sumber Daya Air

Pemanfaatan potensi tambang/galian meskipun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Selatan, tetapi sumbangannya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat kecil (hanya 0,4% dari total tenaga kerja), yang berarti kurang memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat. Potensi tambang/galian yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi berpotensi untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha/industri/rakyat/kecil/RT dengan teknologi sederhana dan mudah diserap masyarakat. Eksploitasi pertambangan saat ini yang dilakukan dalam kawasan hutan arealnya cukup luas yang memerlukan upaya reklamasi hutan.

Tingkat volume kendali pemanfaatan sumber daya air melalui reservoir masih sangat kecil dibandingkan dengan volume potensi tersedia, yang dikawatirkan pada musim kemarau suplay air untuk berbagai kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Kondisi hutan yang tidak proporsional mendukung daerah aliran sungai (DAS) adalah mempengaruhi kuantitas dan kualitas air sesuai peruntukannya terutama pada DAS Jeneberang.

d. Potensi Sumber Daya Pesisir Laut

Potensi sumber daya pesisir dan laut utamanya sumber daya hayati ikan dan sejenisnya telah dieksploitasi secara berlebihan baik melalui perikanan tangkap (laut) maupun budidaya ikan (tambak), sehingga terjadi penipisan sumber daya baik pesisir maupun laut. Masyarakat pesisir dan laut yang jumlahnya cukup besar dengan ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya hayati laut diperhadapkan pada masalah makin terbatasnya dan berkurangnya potensi tangkap yang sangat mempengaruhi kondisi social ekonomi mereka.

Potensi lahan tambak telah dimanfaatkan hampir sebanding dengan potensi tersedia, sehingga tidak layak lagi dilakukan perluasan areal tambak karena akan berdampak cv 'ekologis dan akan terjadi benturan fungsi-fungsi lahan. Potensi sumber daya pesisir dan laut yang prospektif untuk diolah dan dikembangkan adalah sumber daya potensi parawisata, namun diperhadapkan pada kompleksitas masalah dalam pengolaan/eksploitasinya. Agar penanganan strategis pembangunan provinsi Sulawesi Selatan atau yang lebih dikenal dengan program *Good Governance* (pemerintahan yang baik) bisa pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan), sektor koperasi dan UKM, Sektor pertambangan &energy, sektor pendidikan, sektor tenaga kerja, sektor kesehatan, sektor pemukiman, sektor perhubungan dan sektor lainnya. Berbagai peluang investasi khususnya bagi investor local maupun

asing cukup tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang berkaitan dengan pertambangan, industri, pertanian, angkutan dan lainnya. terlaksana sesuai yang diharapkan, maka sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah sektor-sektor yang mempunyai hubungan baik secara langsung dengan program dimaksud. Sektor-sektor prioritas antara lain, sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan), sektor koperasi dan UKM, Sektor pertambangan dan energy, sektor pendidikan, sektor tenaga kerja, sektor kesehatan, sektor pemukiman, sektor perhubungan dan sektor lainnya. Berbagai peluang investasi khususnya bagi investor local maupun asing cukup tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang berkaitan dengan pertambangan, industri, pertanian, angkutan dan lainnya.

3. Peluang Investasi

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konstalasi pembangunan Indonesia. Selain memiliki sumber daya alam yang cukup besar, khususnya di bidang pertanian, pertambangan dan parawisata. Dengan letak strategis di tengah-tengah Indonesia dan menjadi pintu gerbang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif sekaligus kopetitif untuk kegiatan investasi.

Adapun keunggulan untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Posisi yang strategis secara ekonomi sehingga berperan sebagai pusat pelayanan angkutan udara dan laut di Kawasan Timur Indonesia dan Pusat pelayanan jasa perdagangan, industri serta perbankan.
- b. Wilayah yang relative aman bagi kegiatan investasi di Indonesia, dimana gejolak masyarakat dan komunitas buruh relative rendah.
- c. Keanekaragaman potensi sumber daya alam untuk investasi. Ketersediaan infrastuktur wilayah yang memadai bagi kegiatan investasi.
- d. Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar potensial yang belum memanfaatkan secara maksimal.
- e. Komitmen Pemerintah Daerah yang sangat kuat dalam memberikan kemudahan bagi Investor.
- f. Ketersediaan Sumber daya manusia yang berkualitas.
- g. Ketersediaan lahan yang masih luas dan relatif murah.

1) Bidang Pertanian

a. Perkebunan Jagung

Merupakan tanaman pangan yang banyak ditanam petani Sulawesi Selatan akhir-akhir ini karena ekspor yang cukup baik untuk permintaan pakan ternak. Total produksi jagung Sulawesi Selatan adalah lebih kurang 661.241. ton dengan luas tanam 192.456 ha. Mempertimbangkan luas lahan yang tersedia dan maksimalisasi teknologi, diperkirakan produksi jagung masih dapat dinaikkan hingga 2 kali lipat. Daerah yang potensial untuk daerah komoditi ini

terutama adalah Kabupaten Takalar, Bone, Jeneponto, Bulukumba dan Gowa.

b. Perkebunan Kakao

Lebih kurang 70% produk ekspor kakao Indonesia berasal dari Sulawesi Selatan sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara kedua terbesar penghasil kakao dunia setelah Pantai Gading. Oleh karena itu tidak salah jika Sulawesi Selatan disebut sebagai tanah kakao Indonesia. Pada tahun 2005 total produksi kakao adalah 178.426,61 ton dengan luas wilayah perkebunan kakao mencapai 222.566,82 ha. Sampai saat ini kurang dari 10% produksi biji kakao yang diolah di Sulawesi Selatan menjadi "bubuk kakao" sisanya langsung diekspor keluar negeri. Lokasi pengembangn utama komoditi ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.

c. Perkebunan Kopi

Kopi kalosi dan Kopi Toraja merupakan kopi arabika berasal dari Sulawesi Selatan yang telah dikenal di mancanegara. Produksi kopi arabika pada tahun 2005 adalah 15,190,64 ton dengan luas tanaman 26.232 hektar. Wilayah perkebunan kopi Arabika terutama di wilayah Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja. Kopi Robusta adalah jenis kopi lain yang dikembangkan cukup luas di sulsel, khususnya di wilayah Kabupaten Tana Toraja, Bulukumba, Sinjai, Pinrang. Total

produksi Kopi Rubusta di Sulsel pada tahun 2005 adalah 16.692.24 ton dengan luas perkebunan 28.692,78 hektar.

d. Perkebunan Jambu Mete

Sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan sesuai untuk perkebunan Jambu Mete. Khususnya Kabupaten Bone, Pangkep, Sidrap, Barru Bulukumba dan Pinrang. Permintaan ekspor yang semakin baik dari tahun ke tahun menjadikan komoditi ini berkembang dengan pesat. Total produksi Mete tahun 2005 adalah 24.419 ton dengan luas kebun yang umumnya adalah kebun rakyat adalah 68.3146 hektar.

e. Perkebunan Vanili

Terdapat di Kabupaten Wajo, Maritim Selayar, Bulukumba

f. Perkebunan Ubi Kayu

Terdapat hampir semua Kabupaten di Sulawesi Selatan.

g. Tambak Udang

Kegiatan Pertambakan Udang Windu Berorientasi ekspor masih cukup potensial dan diminati investor. Total luas kawasan tambak Udang yang umumnya terkonsentrasi di wilayah pantai barat, khususnya di wilayah Kabupaten Pinrang, Barru dan Pangkep sebesar 98,604 hektar dengan total produksi 12,548.ton

h. Penangkapan Ikan Laut

Produksi Ikan Laut yang paling besar pada tahun 2004 adalah Ikan Cakalang dengan total tangkapan 25,307,7 ton kemudian Ikan Tuna sebanyak 7,063,4 ton. Hasil non ikan lainnya adalah sebanyak 1,052,5 ton dan Kepiting 457,6 ton.

i. Budidaya Rumput Laut

Memfaatkan garis pantai sepanjang 2500 km merupakan peluang budidaya rumput laut di sulsel. Pada Tahun 2004, total produksi rumput laut adalah lebih kurang 4,642,7 ton yang berasal dari budi daya tambak dan laut di perairan Kabupaten Takalar, Jeneponto, Luwu, dan Wajo.

j. Penggemukan Sapi

Merupakan komoditi sektor peternakan yang berkembang untuk memenuhi permintaan local dan diantarpulaukan dari Sulsel. Penghasil terbesar sektor ini adalah kabupaten Gowa, Sidrap, Pinrang, pare-pare dan Enrekang.

2) Bidang Industri

Terdiri dari industri Keramik/ Marmer, industri Pengelolaan Kakao (*powder/butter*), Industri Semen, Industri Pakan Ternak, Industri sutra, Industri Pengelolaan Kopi, Industri Pengelolaan Kayu, Industri Pengelolaan Buah-Buahan, Industri Pengalengan Ikan dan Hasil Laut, Industri Kapal dan Industri Pengolahan.

3) Bidang Pertambangan dan Energi

Investasi menarik di bidang pertambangan dan energy mencakup penambangan pasir besi di Kabupaten Takalar, Maritim

Selayar dan Jeneponto, granit di Kabupaten Maririm Selayar, Luwu Utara; marmer di Kabupaten Maros, Bone, Luwu, Pangkep, Barru, dan Enrekang; pasir silica (kuarsa) di Kabupaten Soppeng, Enrekang, Sidrap, Pinrang, Bone, dan Maros; Batubara di Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Enrekang, Bone dan Sinjai; Pembangkit tenaga Listrik terdapat di Kabupaten Bulukumba, Maririm Selayar dan Pinrang.

4) Bidang Parawisata

- a) Pengembangan Kawasan Wisata/Resort
- b) Pengembangan Transportasi Wisata Laut, diantaranya terdapat di Kabupaten Pangkep (P. Kapoposan), sinjai (P. Sembilan) dan Maritim Selayar (Takabonerate)
- c) Pengembangan Usaha penunjang Wisata Laut
- d) Pembangunan Gedung Pertemuan/Pameran
- e) Pembangunan Perhotelan di Tana Toraja, Makassar, Bira
- f) Pengembangan Pulau-pulau Kecil di depan Sektor Industri di Provinsi Sulawesi Selatan untuk wisata
- g) Pengembangan Wisata Bahari dan Agrowisata

Investasi di bidang parawisata mencakup pengembangan kawasan wisata/*resort*; Pengembangan transportasi wisata laut di antaranya di Kabupaten Pangkep (P. Kapoposan), Sinjai (P. Sembilan) dan Maritim Selayar (Takabonerate); pengembangan usaha penunjang wisata laut; pembangunan gedung pertemuan /pameran ; pembangunan perhotelan di Tana Toraja, Makassar dan

Bira; pengembangan pulau-pulau kecil di depan Sektor Industri di Provinsi Sulawesi Selatan; dan pengembangan wisata bahari dan agrowisata.

5) Bidang Jasa dan Perdagangan

Di bidang jasa dan perdagangan, investasi bisa dikucurkan untuk pembangunan gedung perkantoran, pusat bisnis dan perdagangan, jasa ekspor/impor, perbankan dan pergudangan. Realisasi investasi di Sulawesi Selatan pada 2005 meningkat cukup signifikan. Untuk PMDN di tahun itu terdapat lima investor. Dilihat dari nilai investasi PMDN, untuk provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke-11 dari 33 provinsi di Indonesia dengan total investasi sebesar Rp. 473,7 miliar, Sedangkan untuk PMA, pada 2005 terdapat satu investor asing. Provinsi ini menduduki urutan ke-13 dari 33 provinsi di Indonesia yang menerima kucuran dana asing dengan nilai investasi US \$ 67,1 juta.

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Populasi Penduduk (X1)

Ahli-ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, luas tanah, kekayaan alam dan teknologi yang digunakan. Menurut Smith, perkembangan penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam

perkonomian tersebut dan akhirnya tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Spesialisasi akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena dengan spesialisasi tingkat produktivitas tenaga kerja akan meningkat dan mendorong perkembangan teknologi, (Sukirno, 2006).

Menurut Subandi (2014), pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang selalu digunakan untuk menggambarkan kondisi kependudukan, kemajuan pembangunan dan perekonomian suatu daerah. Irawan dan Suparmoko mengatakan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi yaitu dari segi permintaan dan segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksinya.

Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah merupakan faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang bekerja maka

tenaga kerja tersebut semakin produktif yang pada akhirnya bisa meningkatkan output daerah.

Jika dicermati, berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam tabel 4.1, jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah penduduk sebesar 4.702.951 jiwa meningkat menjadi 5.260.782 jiwa pada tahun 2016.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-55 Tahun) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2012	4.702.951
2013	4.866.100
2014	4.927.209
2015	4.983.386
2016	5.260.782

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Peningkatan tersebut memberikan indikasi bahwa penduduk usia produktif di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat, hal ini tentu saja berpotensi dalam mendorong aktivitas perekonomian. Tenaga kerja produktif dapat meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian, produktivitas yang meningkat dan pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat.

Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yang pesat didukung oleh tersedianya prasarana dan sarana. Peningkatan jumlah penduduk Kota Makassar setiap tahunnya disebabkan perpindahan penduduk dari luar daerah yang Provinsi Sulawesi Selatan. Banyaknya lapangan kerja yang tersedia menjadi faktor yang melatar belakangi tingginya laju imigrasi. Selain itu, Kota Makassar juga dikenal sebagai kota metropolitan yang menyediakan berbagai macam barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

2. Upah Minimum Provinsi (X2)

Upah Minimum Provinsi adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu, Upah mempunyai kedudukan yang strategis bagi tenaga kerja, perusahaan dan bagi pemerintah. Bagi tenaga kerja itu upah digunakan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sedangkan bagi perusahaan upah salah satu sumber biaya dalam menentukan dan

mempengaruhi produksi total perusahaan itu sendiri dan harga dari output suatu barang, sedangkan bagi pemerintah upah di gunakan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.2
Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016

Tahun	Upah Minimum Provinsi	
	UMP Per hari (Rupiah)	UMP Per bulan (Rupiah)
2012	48.000	1.200.000
2013	57.600	1.440.000
2014	72.000	1.800.000
2015	80.000	2.000.000
2016	90.000	2.250.000

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Jika dicermati, berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam tabel 4.2, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 UMR per hari sebesar Rp. 48.000 dan UMP per bulan Rp. 1.200.000 meningkat pada tahun 2016, UMP per hari Rp. 90.000, UMP per bulan Rp. 2.250.000. peningkatan tersebut memberikan indikasi telah terjadi perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan upah diharapkan akan berdampak terhadap perbaikan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi masyarakat meningkat dan pada gilirannya akan berdampak terhadap

peningkatan aktivitas perekonomian di daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Kontribusi Sektor Industri (X3)

Sektor industri memegang peranan penting sebagai faktor produktif dalam memaksimalkan pembangunan. Perkembangan sektor industri tidak hanya ditandai dari perkembangan volume produksi, melainkan juga oleh makin beranekaragamnya jenis produk yang dihasilkan serta mutu yang semakin meningkat. Sektor industri juga berperan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan yang luas sehingga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Tabel 4.3
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah PDRB (Rp. Juta)	Kontribusi (Persen)
2012	27.966,15	13,83
2013	30.545,26	14,03
2014	33.293,32	14,22
2015	35.555,68	14,17
2016	38.454,81	14,27

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Jika dicermati, PDRB sektor industri di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir (2012-2016) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 PDRB sektor industri sebesar Rp. 27,9 miliar meningkat menjadi Rp. 38,4 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan kontribusi

sektor industri terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2012 kontribusi sektor industri terhadap total PDRB sebesar 13,83 persen meningkat menjadi 14,27 persen pada tahun 2016. Peningkatan tersebut memberikan indikasi bahwa sektor industri memiliki peran yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y)

Berdasarkan data yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dilakukan dengan rumus koefisien Gini yang dikembangkan oleh Gini pada tahun 1912. Distribusi pendapatan dikatakan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol. Distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika Koefisien Gini mendekati satu.

Selain menggunakan indeks gini dalam menilai distribusi pendapatan nasional, terdapat cara lain di samping perhitungan Koefisien Gini, yaitu dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia (World Bank). Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin.

Jika dicermati indeks gini di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2016 mengalami penurunan dari 0,42 pada tahun 2012 menjadi 0,40 pada tahun 2016.

Tabel 4.4
Indeks Gini di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016

Tahun	Indeks gini
2012	0,42

2013	0,43
2014	0,45
2015	0,40
2016	0,40

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan akan tetapi indeks gini setiap tahunnya masih berfluktuasi dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten.

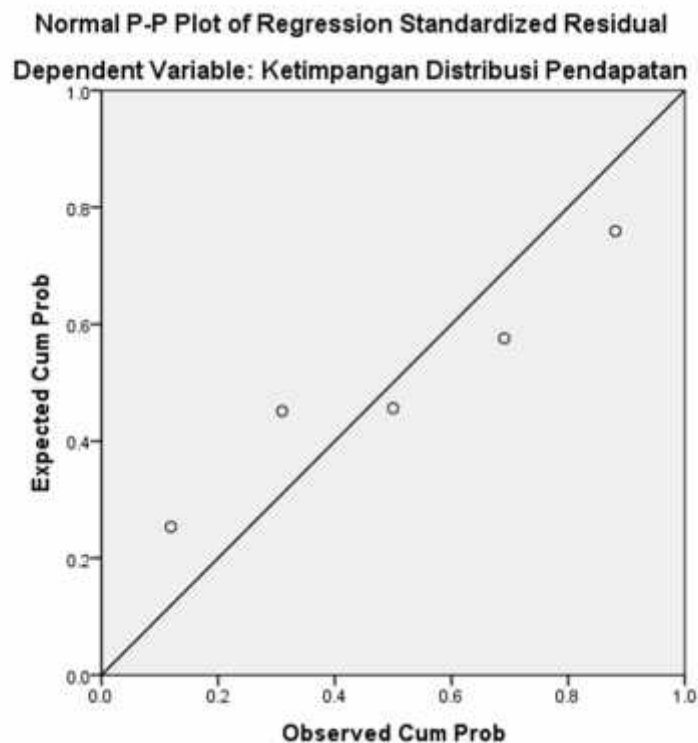
C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji analisis asumsi klasik merupakan salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun pengujiannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian yang dapat dilihat pada pengujian berikut ini:

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dengan memiliki distribusi data normal atau mendekati normal dan metode untuk mengetahui normal atau tidaknya adalah dengan menggunakan metode analisis grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara *Normal Probability Plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal

Berdasarkan tampilan grafik histogram (dapat dilihat pada gambar 4.1), dapat disimpulkan bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan dari histogram di atas, menunjukkan pola regresi normal yang memenuhi asumsi normalitas karena histogram yang ada menyerupai lonceng (mendekati pola distribusi normal).



Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot

Pada gambar 4.1 Normal *Probability Plot* di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak

dipakai untuk memprediksi pembangunan ekonomi berdasarkan variabel bebasnya.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel Independen. Berdasarkan aturan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolenieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolnearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Populasi Penduduk	.933	7.144
UMP	.939	8.820
Kontribusi Sektor Industri	.773	8.673

Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS versi 21 seperti yang tersaji dalam tabel 4.5, diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel independen yaitu nilai VIF populasi penduduk adalah 7,144, VIF UMR adalah 8,820, dan VIF kontribusi sektor industri adalah 8,673. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah multikolinearitas antara variabel independen yakni variabel jumlah penduduk, tenaga kerja, rasio jenis

kelamin, dan rasio beban tanggungan bebas dari multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10.dapat diabaikan karena VIF berada di antara 0,10 dengan 10.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai durbin watson (DW test). Berdasarkan hasil pengolahan SPSS, di peroleh hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.999	.995	.35961	1.625

Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS 21 seperti yang disajikan pada tabel 4.6, diperoleh nilai Durbin Watson (DW) 1,625. Karena nilai durbin watson berada diantara (1,55-2,45), maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Oleh karena itu, Klasifikasi nilai dw yang dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi, (Iqbal hasan, 2001).

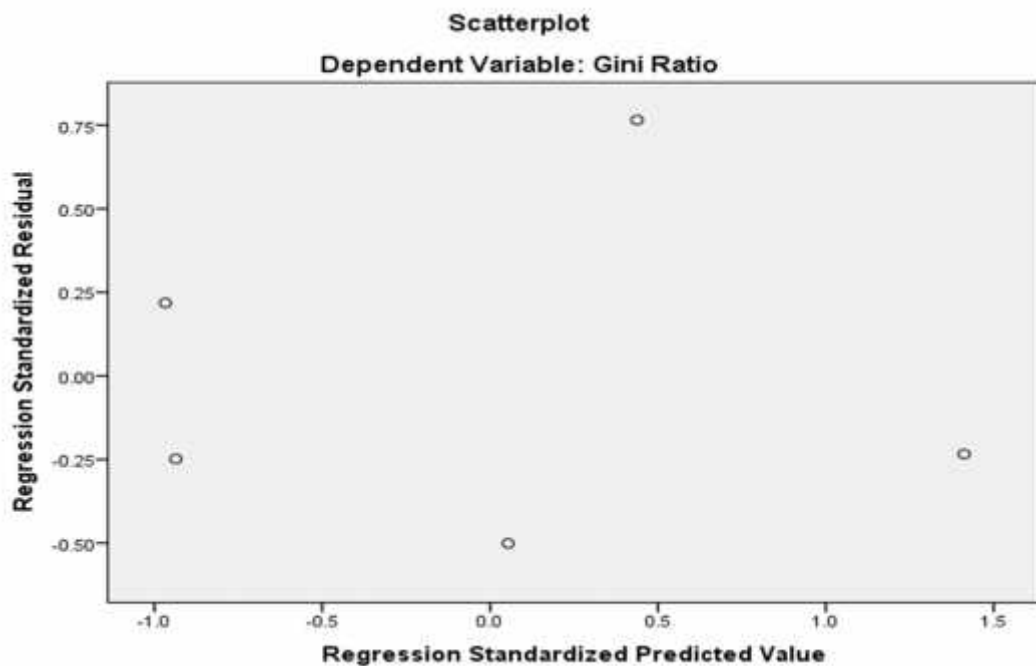
Tabel 4.7
Klasifikasi Nilai DW untuk Autokorelasi

Nilai	Keterangan
-------	------------

<p><1,10 1,10 – 1,54 1,55 – 2,45 2,46 – 2,90 >2,91</p>	<p>Ada Autokorelasi Tidak Ada Kesimpulan Tidak Ada Autokorelasi Tidak Ada Kesimpulan Ada Autokorelasi</p>
--	---

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS 21.



Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Dari grafik scatter plot menunjukkan bahwa data penyebaran berada di atas nol dan di bawah nol tidak terdapat pola yang jelas, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah ditetapkan diterima atau ditolak secara statistik. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji F, uji R square, dan uji t. Hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji secara simultan atau secara bersama-sama untuk mengetahui apakah variabel populasi penduduk, UMR, dan kontribusi sektor industri secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dari hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.010	3	.003	295.740	.043 ^b
1 Residual	.000	1	.000		
Total	.010	4			

a. Dependent Variable: Gini Ratio

b. Predictors: (Constant), Kontribusi Sektor Industri, Populasi Penduduk, UMR

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 295.740 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043, dengan demikian nilai P (sig) = 0,043 < α 0,05. Dengan demikian secara serentak dapat disimpulkan variabel populasi penduduk (X1), UMP (X2), dan kontribusi sektor industri (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y).

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.999	.995	.03358

a. Predictors: (Constant), Populasi Penduduk, UMR, Kontribusi Sektor Industri

b. Dependent Variable: Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, diperoleh hasil bahwa nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,995, hal ini berarti 99,5% variasi perubahan ketimpangan distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, populasi penduduk (X1), UMP (X2), dan kontribusi sektor industri (X3). Sedangkan sisanya sebesar 0,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

3. Uji Partial (Uji T)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.10
Hasil Uji Partial (Uji-T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-30.919	2.231		-13.857	.046
1 Populasi Penduduk	4.024	.220	3.278	18.254	.035
UMP	2.524	.098	12.751	25.855	.025
Kontribusi Sektor Industri	-6.553	.254	-16.313	-25.817	.025

a. Dependent Variable: Gini Ratio

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = -30.919 + 4.024 X_1 + 2.524 X_2 - 6.553 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, diperoleh koefisien regresi populasi penduduk (X1) sebesar 4,024. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi penduduk. Setiap peningkatan populasi penduduk sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 4,024 persen, begitupun sebaliknya setiap penurunan populasi penduduk sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 4,024 persen. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,035 < 0,05$), maka variabel populasi penduduk (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Koefisien regresi variabel UMP (X2) sebesar 2,524, koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara UMP terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Setiap peningkatan UMP sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 2,524 persen, begitupun sebaliknya setiap penurunan UMP sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 2,524 persen. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,025 < 0,05$), maka variabel UMP (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Koefisien kontribusi sektor industri (X3) sebesar -6,553, koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antar kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Setiap peningkatan kontribusi sektor industri sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 6,553 persen, begitupun sebaliknya setiap penurunan kontribusi sektor industri sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 6,553 persen. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,025 < 0,05$), maka pada taraf signifikansi 5% kontribusi sektor industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Populasi Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS yang disajikan dalam tabel 4.10, nilai koefisien regresi variabel populasi penduduk sebesar 4,024 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035. Hal ini memberikan indikasi bahwa variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan populasi akan meningkatkan ketimpangan disitribusi pendapatan, begitupun sebaliknya penurunan populasi penduduk akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dengan demikian hipotesis awal yang diajukan diterima.

Hasil perhitungan regresi tersebut telah menunjukkan konsistensi terhadap teori yang dikemukakan oleh Todaro (2000), bahwa pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Fulgsang (2013) yang mengungkap bahwa Salah satu

faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Sub Saharan Afrika adalah peningkatan populasi penduduk. Populasi penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar, hal ini lah berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan.

Faktanya di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk yang meningkat disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran setiap tahunnya dan tingginya migrasi dari berbagai daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan tersebut berdampak pada tingginya permintaan tenaga kerja, akan tetapi kondisi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran tenaga kerja sehingga distribusi pendapatan menjadi timpang di berbagai daerah.

2. Pengaruh UMP Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS yang disajikan dalam tabel 4.10, nilai koefisien regresi variabel UMP sebesar 2,524 dengan tingkat signifikansi 0,025. Hal ini memberikan indikasi bahwa variabel UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan UMP akan meningkatkan

ketimpangan disitribusi pendapatan, begitupun sebaliknya penurunan UMP akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dengan demikian hipotesis awal yang diajukan ditolak.

Hasil perhitungan regresi tersebut telah menunjukkan konsistensi terhadap hasil penelitian yang dilakukan Nangarumba, (2015). Hasil penelitian mengungkap bahwa peningkatan variabel upah minimum provinsi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dikarenakan kenaikan upah tersebut lebih banyak menguntungkan masyarakat perkotaan dimana industri terkondentrasi di perkotaan. Sementara masyarakat di pedesaan yang mayoritas mata pencaharian adalah petani belum merasakan dampak langsung dari kenaikan upah. Faktanya di Provinsi Sulawesi Selatan industri masih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan khususnya di Kota Makassar. Sehingga jika upah meningkat maka pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan semakin tinggi. Dalam hal ini masyarakat di pedesaan tidak diuntungkan dengan meningkatnya upah, daya beli mereka tetap rendah sebagai akibat dari dampak industrialisasi yang terkonsentrasi di perkotaan. Oleh karena itu untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata, sebaiknya industri tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, akan tetapi juga diupayakan terkonsentrasi di pedesaan. Dengan demikian diharapkan akan berdampak terhadap tingginya penyerapan tenaga kerja di pedesaan

yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan.

3. Pengaruh Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS yang disajikan dalam tabel 4.10, nilai koefisien regresi variabel kontribusi sektor industri sebesar -6,553 dengan tingkat signifikansi 0,025. Hal ini memberikan indikasi bahwa variabel kontribusi sektor industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan kontribusi sektor industri akan menurunkan ketimpangan disitribusi pendapatan, begitupun sebaliknya penurunan kontribusi sektor industri akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan dengan demikian hipotesis awal yang diajukan ditolak.

Hasil ini telah sejalan dengan temuan Kuznets (2000) dimana pada tahap awal pengembangan, pertumbuhan sektor ekonomi akan mengakibatkan memburuknya distribusi pendapatan. Akan tetapi pada tahap selanjutnya perlahan daerah akan mendapatkan keuntungan dari pengembangan pertumbuhan sektor ekonomi. Faktanya di Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan sektor industri selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PDRB. Hal ini memberikan indikasi bahwa telah terjadi transformasi struktural ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, yang semula mengandalkan sektor pertanian untuk

menopang perekonomian daerah perlahan mengandalkan sektor industri. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada migrasi atau perpindahan tenaga kerja yang semula bekerja pada sektor pertanian berpindah ke sektor industri. Hal ini tentu saja akan berdampak pada penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB, hal ini ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahunnya dan sebaliknya sektor industri justru mengalami peningkatan kontribusi setiap tahunnya. Hal ini tentu saja menjadi hal yang wajar mengingat pendapatan yang diterima di sektor industri relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian. Sehingga kondisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam sektor industri.

Sektor industri diyakini mampu untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mendorong sektor industri dengan pola produksi padat karya, sehingga berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sektor industri diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan akan tetapi juga di pedesaan, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat di perkotaan dan di pedesaan semakin kecil, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kebijakan diharapkan dapat

diarahkan pada peningkatan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Seperti mendorong peningkatan kinerja infrastruktur di daerah, mempermudah kerangka regulasi seperti kemudahan dalam perizinan investasi, kondisi tersebut diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi variabel populasi penduduk adalah 4,024 dengan tingkat signifikansi 0,035. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Setiap peningkatan populasi penduduk akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, begitupun sebaliknya setiap penurunan populasi penduduk akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Nilai koefisien regresi variabel UMP adalah 2,524 dengan tingkat signifikansi 0,025. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan UMP akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, begitupun sebaliknya penurunan UMP akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Nilai koefisien regresi variabel kontribusi sektor industri adalah -6,553 dengan tingkat signifikansi 0,025. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kontribusi sektor industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan kontribusi

sektor industri akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, begitupun sebaliknya penurunan kontribusi sektor industri akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung sehingga penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai produktivitas yang tinggi yang pada gilirannya akan berdampak terhadap tingginya pendapatan masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan guna mempertinggi kualitas tenaga kerja, memberikan latihan keterampilan bagi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab untuk mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat desa dan kota, maka pemerintah Sulawesi Selatan Perlu membuat program pelatihan ketenagakerjaan agar menambah skill dari penduduk yang berada di pedesaan sehingga Mereka tidak hanya terampil mencari penghasilan dari sektor pertanian saja namun juga terampil di sektor-sektor lainnya seperti sektor industri. Dengan adanya program tersebut diharapkan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan dan nantinya akan mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan. UMP provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup bagus, namun

pemerintah agar kiranya dapat memperhatikan lagi tingkat UMP agar dapat disesuaikan dengan tingkat inflasi dan harga-harga umum di masa mendatang. Sebab jika tingkat UMP yang ada sekarang nilainya akan semakin rendah jika dikurangi dengan tingkat inflasi tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artiani,E.L. 1998. Upah Minimum Provinsi Studi Kelayakan Kelayakan Kebijakan Penyesuaian. *Jurnal Ekonomi Bisnis Ekonom Indonesia*. Vol 13, No.1.
- Ayana. 2012. Pengertian Industri, (Online) (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/viewFile/10460/10046>.DiaksesPada 25 Maret 2018).
- Gusata. 2014. Kebijakan Pemerintah Di Bidang Industri. (Online) (<http://gusasta.blogspot.co.id/2014/02/kebijakan-pemerintah-di-bidang-industri.html>. Diakses Pada 27 Maret 2018).
- Ikhsan. (ed). 1995. *Indikator-Indikator Makro*. Fakultas Ekonomi UI : Jakarta.
- Imas, Mayawatti. 2013 , faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. (Online) (<http://imasmayawatti.blogspot.co.id/2013/04/distribusi-pendapatan-nasional.html>. Diakses pada 27Maret 2018).
- Iqtisaduna, 2015 Upah Minimum Provinsi,(Online), Vol.1.No.1, (<http://C:/Users/User/Downloads/1153-2280-1-PB.pdf>. Diakses Pada 27 Maret 2018).
- Jhigan, Rostow. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Jakarta : UPP STIM YKPN
- L, M. Jhingan. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. RajawaliPers : Jakarta.
- Masyita, Siti. Contribution Agricultural Sector to Growth Of Economic. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.1, No.2.
- Mulyadi.2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Rajawali Pers : Jakarta
- Sirajuddin. 2012. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Alauddin University Press : Makassar.
- Sukirno, Sadono, 2005, *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Ketiga*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen SDM dan Ketenaga kerjaan*. Graha Ilmu: Jakarta.

Undang-Undan Republik Indonesian No 5 tahun 1984 tentang perindustrian. 1984 . JAKARTA

Zaenuddin, Kabai. 2015. Pengukuran Distribusi Pendapatan, (Online) (<http://ekonomisajalah.blogspot.co.id/2015/11/distribusi-pendapatan.html>. Diakses Pada 27 Maret 2018).

Zahara, Fatma. 2012. Pemerataan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Data Regresi Variabel Populasi Penduduk, UMP, dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016

Tahun	Populasi Penduduk (Jiwa)	UMP (Rupiah)	Kontribusi Sektor Industri (Rupiah)	Gini Ratio
2012	4702951	1200000	27966.15	0.42
2013	4866100	1440000	30545.26	0.43
2014	4927209	1800000	33293.32	0.45
2015	4983386	2000000	35555.68	0.4
2016	5260782	2250000	38454.81	0.4

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 (data diolah)

Lampiran 2.

Data Regresi Logaritma Natural (ln) Variabel Populasi Penduduk, UMP, dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016

Tahun	Populasi Penduduk (X1)	UMP (X2)	Kontribusi Sektor Industri (X3)	Gini Ratio (Y)
2012	15.36370074	13.99783211	10.23875013	- 0.867500568
2013	15.39780335	14.18015367	10.3269648	- -0.84397007
2014	15.41028326	14.40329722	10.41311206	- 0.798507696
2015	15.42162014	14.50865774	10.4788552	- 0.916290732
2016	15.47579024	14.62644077	10.55723906	- 0.916290732

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 (data diolah)

Lampiran 3.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.999	.995	.03358

a. Predictors: (Constant), Populasi Penduduk, UMR, Kontribusi Sektor Industri

b. Dependent Variable: Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Lampiran 4.

Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.010	3	.003	295.740	.043 ^b

Residual	.000	1	.000		
Total	.010	4			

a. Dependent Variable: Gini Ratio

b. Predictors: (Constant), Kontribusi Sektor Industri, Populasi Penduduk, UMR

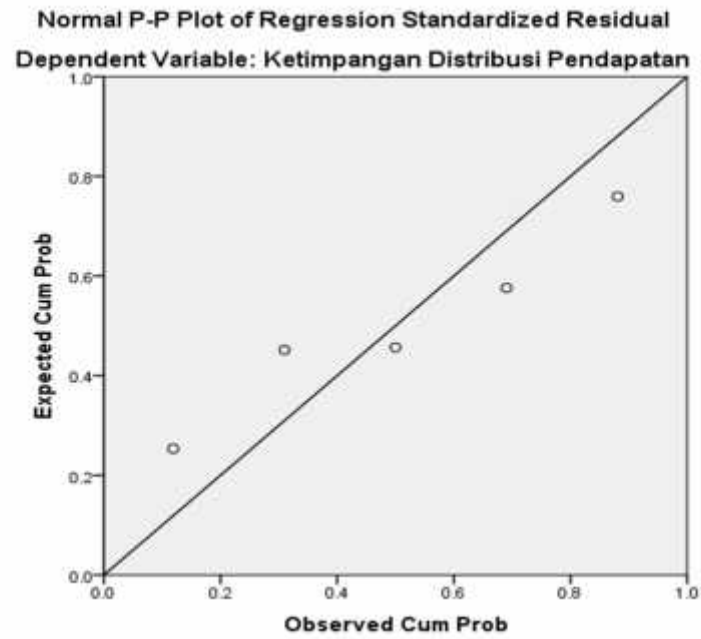
Lampiran 5.

Hasil Uji Partial (Uji-T)

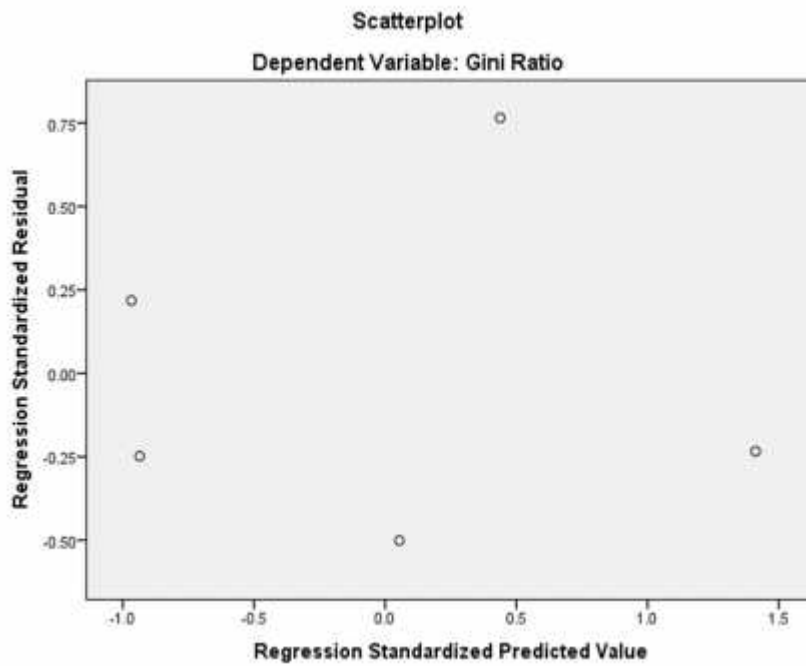
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-30.919	2.231		-13.857	.046
1 Populasi Penduduk	4.024	.220	3.278	18.254	.035
UMP	2.524	.098	12.751	25.855	.025
Kontribusi Sektor Industri	-6.553	.254	-16.313	-25.817	.025

a. Dependent Variable: Gini Ratio

Lampiran 6.



Lampiran 7.



BIOGRAFI PENULIS



ANTO, lahir di sinjai, pada tanggal 5 Mei 1994 merupakan anak kedua dari dua bersaudarah, yang merupakan buah cinta dari pasangan Taju dengan Buati. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Salemo Lorong 158 A No 7 RW 01/04 Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota Makassar. Penulis telah menempuh pendidikan sebagai berikut. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 228 Pakokko dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Sinjai Selatan, tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tellulimpoe dan berganti nama menjadi SMA Negeri 9 Sinjai dan tamat pada tahun 2013, dan pada tahun 2013, dan mulai tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata Satu sampai sekarang. Sebagai tugas akhir, maka penulis menulis sebuah skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016”